



Peranan Lurah Dalam Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan di Kelurahan Moengko Baru

Herlan Lagantondo ^{a, 1*}

^a Jurusan Administrasi Publik, FISIP Universitas Sintuwu Maroso, Jl. P. Timor No. 1, Poso, Sulawesi Tengah, 94619

¹ email penulis pertama*; herlan@unsimar.ac.id

*korespondensi penulis herlan@unsimar.ac.id

INFO ARTIKEL	ABSTRAK
<p>Riwayat Artikel: Diterima: 5-8-23 Disetujui: 22-8-23</p> <hr/> <p>Kata Kunci: Peranan Pemerintahan Pembangunan Kemasyarakatan</p> <hr/> <p>Keywords: Role Government Development Society</p>	<p>Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan lurah dalam pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Metode penelitian dalam penulisan ini adalah pendekatan Kualitatif dengan Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peranan Lurah dalam pelaksanaan tugas pemerintahan belum berjalan dengan baik, hal ini karena pemerintah kelurahan kurang memberikan petunjuk dan arahan berdasarkan ketentuan yang berlaku antara. Untuk pembangunan terlaksana dengan baik, hal ini karena lurah kurang koordinasi kegiatan – kegiatan pembangunan sehingga ada sebagian dapat dikerjakan melalui kerja bakti tetapi ada sebagian proyek yang dikerjakan melalui kegiatan perorangan atau melalui buruh bangunan sebenarnya pekerjaan tersebut dapat dikerjakan dengan kerja bakti tanpa menggunakan buruh bangunan. dan Untuk kemasyarakatan belum baik. Hal ini dapat dibuktikan dengan belum mengoptimalkan seluruh potensi sumber daya pembangunan bersama lembaga kemasyarakatan dalam melakukan pembinaan terutama pembinaan dalam kaitan dengan bidang ketertiban dan keamanan masyarakat melakukan pembinaan dalam bidang kerohanian, dan berbagai pembinaan yang berkaitan dengan masalah - masalah seperti mengatasi konflik sosial yang sering terjadi</p> <p>Abstract: This study aims to determine the role of the village head in government, development and society. The research method in this writing is a Qualitative approach with Data collection techniques through interviews, observations and documentation. The results of the study indicate that the role of the village head in carrying out government duties has not been running well, this is because the village government does not provide enough guidance and direction based on applicable provisions between. For development to be carried out well, this is because the village head does not coordinate development activities so that some can be done through community service but there are some projects that are carried out through individual activities or through construction workers, in fact the work can be done through community service without using construction workers. and for society it is not good. This can be proven by not optimizing the entire potential of joint development resources with community institutions in carrying out coaching, especially coaching in relation to the field of public order and security, carrying out coaching in the field of spirituality, and various coaching related to problems such as overcoming social conflicts that often occur.</p>



PENDAHULUAN

Secara strategis dikatakan bahwa pembangunan aparatur pemerintahan kelurahan ditunjukkan pada penyempurnaan dan kualitas seluruh unsur sistem aparatur pemerintahan kelurahan, dengan tujuan pokok adalah agar terwujudnya efektivitas administrasi pemerintahan kelurahan yang berdisiplin, mampu, produktif, berdaya guna dan berhasil guna, serta bersih dan berwibawa dalam penyelenggaraan tugas umum pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang dilandasi sikap tanggap dan semangat pengabdian pada masyarakat bangsa dan negara sesuai Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945.

Hal ini berarti pula meningkatkan kemampuan dan kualitas aparatur dalam melayani, mengayomi serta menumbuhkan prakarsa dan peran serta masyarakat dalam pembangunan. Kepala kelurahan sebagai aparatur pemerintahan yang mengabdikan diri pada masyarakat dan sekaligus dalam melayani kepentingan umum (*publik service*) dalam bidang tugasnya, mengemban tanggung jawab yang cukup besar dalam rangka penyelenggaraan pembangunan nasional. Disamping itu pula aparatur pemerintahan kelurahan sebagai penyelenggara di bidang pemerintahan dan pembangunan, dapat dikatakan sebagai panutan dari segala aktivitas yang sedang berjalan. Partisipasi dan peran aktifnya diharapkan sebagai motivator dalam pembangunan yang harus juga diimbangi dengan tugas – tugas pemerintahan yang memadai. Dengan tujuan terwujudnya daya guna dan hasil guna utamanya dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Menurut Pamudji (2001: 27) Kepala kelurahan sebagai aparatur pemerintah yang ada di kelurahan mempunyai kekuasaan penuh dalam menjalankan aktivitasnya sebagai administrator pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan yang menjadi wilayah kerjanya. Hal inilah yang sering mendorong para aparat kelurahan untuk berbuat sesuka hatinya karena aparat kelurahan sebagai sarana administrasi yang netral untuk mencapai tujuan dalam menjalankan fungsinya senantiasa dipengaruhi oleh beberapa faktor perilaku aparat itu sendiri seperti diantaranya faktor pendidikan, faktor genetik, pengalaman dan lingkungan. Kelurahan dimana tempat para kepala kelurahan menjalankan aktivitasnya akan terlihat berbagai ragam tingkah laku (perilaku) yang bersifat manajerial yaitu seorang lurah dalam menjalankan tugas selalu di delegasikan kepada bawahannya, organisasional yaitu dimana seorang lurah bisa menggerakkan roda organisasi yang ada di tempat kerjanya, informasional yaitu seorang selalu memberikan informasi dan berkomunikasi dengan masyarakat dan bawahannya dan operasional yaitu seorang lurah bisa bekerja sama dengan masyarakat. Hal semacam ini timbul sebagai akibat dari adanya pengaruh budaya, lingkungan serta agama yang tidak kalah pentingnya dengan ketiga faktor yang telah diuraikan sebelumnya. Dalam upaya pemerataan pembangunan khususnya dikelurahannya, Lurah diperhadapkan pada bagaimana mengawasi dan mengontrol jalannya tugas aparat, sehingga dapat bekerja dengan efisien dan sebaik mungkin demi kepentingan masyarakat dan pembangunan secara keseluruhan. Lurah dan aparturnya yang dipandang sebagai abdi masyarakat sekaligus sebagai abdi Negara yang dipercayakan oleh Negara, hendaknya menghilangkan citra yang kurang baik di mata masyarakat yang selama ini melekat pada hati nuraninya, bahwa pemerintah diidentifikasi dengan kurang berperan dalam pemerintahan dan pembangunan dalam arti kata bahwa aparat kelurahan merupakan cara kerja atau susunan pekerjaan yang menurut tata aturan yang banyak liku – likunya. Karena itu sadar akan tanggung jawabnya sebagai abdi Negara dan abdi masyarakat hendaknya didorong dengan rasa pengabdian serta tanggung jawab yang tinggi dalam rangka penyelenggaraan roda pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sehingga nantinya akan dapat tercipta keberhasilan sebagai wujud tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat. Pengembangan aparatur pemerintah kelurahan akan diarahkan pada efektivitas pelaksanaan administrasi pemerintahan kelurahan melalui penyempurnaan sistem administrasi yang baik sesuai dengan aturan yang berlaku.

Pembangunan kelurahan akan berhasil apabila hambatan dan problem – problem pembangunan dapat dipecahkan secara tepat. Ini dapat terjadi apabila pemerintah kelurahan dapat menyelenggarakan administrasi pemerintahan secara tertib dan teratur. Administrasi pemerintahan kelurahan yang tertib dan teratur apabila pemerintahan kelurahan mampu menjadi sumber segala data, informasi pembinaan dan pengawasan. Efektivitas administrasi sebagai sumber informasi dan pusat ingatan tentang kegiatan – kegiatan pemerintahan kelurahan dan pembangunan kelurahan, yang diperlukan bagi tindakan penentuan kebijaksanaan dan pembuatan keputusan. Untuk menunjang setiap program pembangunan diperlukan koordinasi yang baik antar instansi yang terkait. Pembangunan kelurahan adalah bagian pembangunan nasional yang mengutamakan prakarsa dan partisipasi masyarakat untuk melaksanakan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Lurah mempunyai peran yang sangat menentukan sebagai administrator dan sekaligus sebagai pimpinan di dalam masyarakat untuk menggerakkan partisipasi masyarakat di dalam melaksanakan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Kelurahan dipimpin oleh lurah yang dibantu oleh perangkat kelurahan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan tugas dari Bupati dalam hal ini tugas tersebut maka pemerintah kabupaten perlu melakukan verifikasi tugas yang dilimpahkan secara proporsional. Lurah secara langsung merupakan aparatur pemerintah daerah yang ditugaskan di tiap-tiap kelurahan memiliki kewibawaan yang sangat lemah pada sisi kemasyarakatan sebab Lurah tidak dipilih oleh rakyat setempat. Lurah kurang optimal dalam melaksanakan pekerjaan karena terikat dengan jam tertentu (jam 07.30- jam 16.00), apalagi lurah dan staf administrasi lainnya berdomosili di tempat lain

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan bahwa peranan lurah dalam pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di kelurahan Moengko Baru secara umum belum dilaksanakan dengan baik hal ini tergambar pelaksanaan tugas tidak tepat waktu, selain itu teridentifikasi bahwa lurah kurang melakukan koordinasi kegiatan – kegiatan pembangunan ditingkat kelurahan dengan mengoptimalkan seluruh potensi sumber daya pembangunan bersama lembaga kemasyarakatan lainnya seperti LSM mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pemeliharaan hasil-hasil pembangunan yang ada di tingkat kelurahan. Berkaitan dengan masalah tersebut sesuai penelitian yang ada maka penulis mengambil judul “ Peranan Lurah Dalam Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan di Kelurahan Moengko Baru “.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian dengan penelitian deskriptif kualitatif yaitu untuk menggambarkan atau melukiskan secara rinci sistimatis dan akurat mengenai fakta – fakta, sifat-sifat serta hubungan fenomena yang diselidiki dari yang bersifat umum ke khusus. Dalam penelitian ini hanya mengkhususkan pada satu permasalahan yaitu peranan Lurah dalam pelaksanaan pemerintahan, dan pembangunan dan Kemasyarakatan di Kelurahan Moengko Baru Kecamatan Poso Kota Kabupaten Poso. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini dikelompokkan dalam data Primer dan data Sekunder dengan

eknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data menyatakan bahwa” Proses data kedalam pola kategori dan satuan uraian dapat ditemukan hipotesis kerja seperti yang disarankan kepada oleh data”. Menurut Efendi dan Maning dalam Singarimbun (2006 : 263) analisis data adalah Proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih muda dibaca dan di interpretasikan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Tugas Pemerintah Kelurahan dalam Bidang Pemerintahan

Pemerintah Kelurahan pada dasarnya adalah merupakan wakil dan pemerintah yakni merupakan pejabat Daerah yang bertanggungjawab kepada Bupati atas usulan Camat sesuai dengan petunjuk dan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pemerintah Kelurahan dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan maka dibantu oleh perangkat-perangkat yang ada yakni Sekretaris Kelurahan dan Kepala-Kepala Seksi. Sekretaris Kelurahan mewakili tugas yakni mengemban tugas-tugas administratif yang berada dalam lingkungan kelurahan Sekretaris Kelurahan juga memiliki bidang-bidang atau urusan-urusan yakni urusan bidang pemerintahan, urusan pembangunan, sosial ekonomi dan urusan kemasyarakatan tergantung dan petunjuk yang dilakukan oleh Pemerintah Kelurahan. Sedangkan Rukun Tetangga (RT) pada prinsipnya memiliki tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas di lingkungannya masing-masing yakni pembina masyarakat, memberikan petunjuk dan arahan serta membantu / mencari jalan keluar apabila dalam masyarakat telah terjadi perselisihan dan menjaga keamanan dan ketertibannya dilingkungan masing-masing. Sekretaris Kelurahan dan Rukun Tetangga (RT) bertanggung jawab kepada Pemerintah Kelurahan yaitu Lurah.

Dan hasil pengamatan di lokasi penelitian tentang pelaksanaan tugas Pemerintah Kelurahan di Kelurahan Moengko Baru dalam kaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan adalah belum berjalan dengan baik, hal ini karena pemerintah kelurahan kurang memberikan petunjuk dan arahan berdasarkan ketentuan yang berlaku antara lain :

1. Petunjuk Pelaksanaan Administrasi kelurahan seperti administrasi penduduk, administrasi bidang keuangan dan administrasi tanah..
2. Memberikan Pengawasan pada setiap kinerja yang dilakukan bawahannya baik sekretaris lurah dan Rukun Tetangga.
3. Membantu kegiatan administarsi seperti upaya untuk memberikan pelayanan secepat mungkin mengenai pengurusan KTP, Surat Ijin Berpergian, Surat Keterangan Nikah dan Surat Keterangan Berkelakuan Baik serta berbagai pelayanan lainnya.

Pelaksanaan Tugas Pemerintah Kelurahan Dalam Pembangunan

Dari hasil pengamatan tentang pelaksanaan pembangunan yang diprakarsai Pemerintah Kelurahan, belum terlaksana dengan baik, hal ini karena lurah kurang koordinasi kegiatan – kegiatan pembangunan sehingga ada sebagian dapat dikerjakan melalui kerja bakti tetapi ada sebagian proyek yang dikerjakan melalui kegiatan perorangan atau melalui buruh bangunan.

Proyek - proyek yang dikerjakan secara fisik melalui bentuk kerja bakti misalnya seperti pembuatan selokan air, pembuatan jalan setapak, pembuatan gedung ibadah dan berbagai bentuk kegiatan lainnya. Dalam bidang pembangunan non fisikpun lurah tidak pernah aktif di bidang kerohanian. Dalam setiap acara-acara menyambut Perkawinan, Hari Ulang Tahun, Kematian bahkan berbagai bentuk kegiatan kerohanian lainnya Pemerintah Kelurahan tidak selalu memberikan peranan penting dalam memberikan pembinaan dan pengarahan kepada masyarakat.

Pelaksanaan Tugas Pemerintah Kelurahan dalam bidang kemasyarakatan

Seiring dengan perkembangan zaman dan perkembangan Ilmu Pengetahuan dan teknologi, maka setiap sendi dan tatanan kehidupan sosial dalam masyarakat sedikit demi sedikit mengalami suatu perubahan. Apalagi seiring dengan perkembangan globalisasi yang telah melanda di seluruh wilayah Republik Indonesia.

Dengan perubahan - perubahan yang di alami dalam masyarakat secara langsung dapat menimbulkan efek negatif dan positif. Secara positif akibat dari perubahan tersebut masyarakat dapat merasakan banyak kemudahan yakni kemudahan yang dilakukan pemerintah seperti berbagai fasilitas di bidang pendidikan, sarana transportasi dan sarana - sarana lainnya. Bila dibandingkan dengan kemajuan yang dialami dalam pelaksanaan pembangunan sekarang ini sangat besar. Sedangkan secara negatif dan dampak perubahan yang dialami dalam masyarakat adalah terjadinya pergeseran nilai - nilai dalam masyarakat. Selain dampak yang sudah disebutkan maka masalah yang ditimbulkan juga cukup kompleks meningkatnya berbagai masalah kemiskinan keterbelakangan, meningkatnya masalah kriminalitas seperti kenakalan remaja, dan berbagai masalah - masalah lainnya. Untuk membuktikan sejauh mana peranan ternyata peranan Pemerintah Kelurahan dalam menunjang pelaksanaan tugas dibidang kemasyarakatan sebagian besar menyatakan adalah belum baik. Hal ini dapat dibuktikan dengan belum mengoptimalkan seluruh potensi sumber daya pembangunan bersama lembaga kemasyarakatan dalam melakukan pembinaan terutama pembinaan dalam kaitan dengan bidang ketertiban dan keamanan masyarakat melakukan pembinaan dalam bidang kerohanian, dan berbagai pembinaan yang berkaitan dengan masalah - masalah seperti mengatasi konflik sosial yang sering terjadi .

Sebenarnya program sosialisasi tentang semboyan Sintuwu Maroso menjadi salah satu program yang sangat penting dan Pemerintah Kelurahan dalam memberikan kesadaran kepada masyarakat tetapi semuanya tidak pernah dilakukan oleh pemerintah kelurahan Moengko Baru

PENUTUP (DITULIS TANPA PENOMORAN)

Peranan Lurah dalam pelaksanaan tugas pemerintahan belum berjalan dengan baik, hal ini karena pemerintah kelurahan kurang memberikan petunjuk dan arahan berdasarkan ketentuan yang berlaku antara lain Petunjuk Pelaksanaan Administrasi kelurahan seperti administarsi penduduk, administarsi bidang keuangan dan administrasi tanah, Memberikan Pengawasan pada setiap kinerja yang dilakukan bawahannya baik sekertaris lurah dan Rukun Tetangga, Membantu kegiatan administarsi seperti upaya untuk memberikan pelayanan secepat mungkin mengenai pengurusan KTP Surat Ijin Bepergian, Surat Keterangan Nikah dan

Surat keterangan Berkelakuan baik serta berbagai pelayanan lainnya. Untuk pembangunan terlaksana dengan baik, hal ini karena lura kurangnya koordinasi kegiatan – kegiatan pembangunan sehingga ada sebagian dapat dikerjakan melalui kerja bakti tetapi ada sebagian proyek yang dikerjakan melalui kegiatan perorangan atau melalui buruh bangunan sebenarnya pekerjaan tersebut dapat dikerjakan dengan kerja bakti tanpa menggunakan buruh bangunan. dan Untuk masyarakat belum baik. Hal ini dapat dibuktikan dengan belum mengoptimalkan seluruh potensi sumber daya pembangunan bersama lembaga masyarakat dalam melakukan pembinaan terutama pembinaan dalam kaitan dengan bidang ketertiban dan keamanan masyarakat melakukan pembinaan dalam bidang kerohanian, dan berbagai pembinaan yang berkaitan dengan masalah - masalah seperti mengatasi konflik sosial yang sering terjadi .

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi, 2000, Manajemen Penelitian, edisi Baru, Pt.Rineka Cipta, Jakarta,
- Pamudji.S, 1992, Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia, Bina Cipta Jakarta
- Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 2005 Tentang Kelurahan
- Sarundayang, 2000, Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah, Pustaka Sinar Harapan Jakarta.
- Saparin, S, 1991, Administrasi Pemerintahan Desa, Gramedia Jakarta
- Sugiyono, Metode Penelitian Administrasi, 2004, Alfabeta, Bandung,
- Suryaningrat., Bayu, 1990, Pengantar Ilmu Pemerintahan, Bina Cipta Jakarta
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
- Keputusan Bupati Nomor 30 tahun 2000 tentang Organisasi Pemerintah
- Wijaya, RAW, 2005, Penyelenggaraan otonomi di Indonesia, RadjaGrafindo Persada, Jakaarta,